

**MENGOPTIMALKAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK
LAYANAN VISA DAN IZIN TINGGAL: ANALISIS STUDI KASUS DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM**

**Hanif Yudha Pratama¹, Leonardo Oktaviano Rendu², Marshanda³, Nafa Fadilah⁴,
Ni Luh Putu Radha Laksmi⁵, Rasona Sunara Akbar⁶**

Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: hanifpratama503@gmail.com¹, leonardo.0viano@gmail.com²,
aacaaa939@gmail.com³, nafafadilah42@gmail.com⁴, f.radhalaksmi26@gmail.com⁵,
akbarrasona@gmail.com⁶

Abstrak

Optimalisasi teknologi informasi dalam layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam diwujudkan melalui integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan e-Visa. SIMKIM, sebagai inovasi kelembagaan sejak 2007, berperan sentral dalam mendukung efisiensi, transparansi, serta akurasi pengelolaan data keimigrasian secara terpusat dan real-time. Integrasi SIMKIM dengan e-Visa memungkinkan proses permohonan visa dan izin tinggal dilakukan secara daring, sehingga data pemohon tersinkronisasi otomatis dan validasi administrasi berlangsung lebih terstandardisasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, dengan sumber data sekunder dari jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kedua sistem tersebut mempercepat proses administrasi, meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian, serta memperkuat tata kelola berbasis e-Government. Namun, implementasi sistem digital ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, disparitas kompetensi sumber daya manusia, serta kebutuhan harmonisasi lintas instansi dan sistem. Selain itu, literasi digital pemohon dan keterbatasan bandwidth menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan daring. Oleh karena itu, strategi kolaboratif melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan reformasi birokrasi, serta peningkatan pelatihan dan infrastruktur menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital keimigrasian.

Kata Kunci — E-Visa, Optimalisasi Teknologi Informasi, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

ABSTRACT

This study investigates the optimization of information technology in immigration services at the Batam Class I Special Immigration Office, emphasizing the integration of the Immigration Management Information System (SIMKIM) and e-Visa platforms. Since its adoption in 2007, SIMKIM has functioned as a pivotal institutional innovation, enhancing efficiency, transparency, and accuracy in immigration data management through centralized, standardized, and real-time processing. The synergy between SIMKIM and the e-Visa system facilitates fully digitalized visa and residence permit applications, enabling automated data synchronization and streamlined validation processes. Utilizing a descriptive qualitative approach grounded in literature review, this research draws upon secondary sources, including academic journals and official reports. The findings reveal that these integrated systems have significantly improved administrative efficiency and oversight. However, persistent challenges remain, such as disparities in

technological infrastructure, human resource competencies, and the need for cross-agency system harmonization. Addressing these issues requires collaborative strategies, institutional strengthening, and ongoing technological innovation to ensure sustainable digital transformation in immigration governance.

Keywords: E-Visa, Immigration Management Information System (SIMKIM), Information Technology Optimization

PENDAHULUAN

Sejak 2007, Direktorat Jenderal Imigrasi mengimplementasikan SIMKIM sebagai sistem terintegrasi untuk mendukung operasional dan pengambilan kebijakan keimigrasian, termasuk dalam penerbitan izin tinggal bagi orang asing di Unit Pelaksana Teknis (Akasy, 2021). Dalam konteks manajemen teknologi informasi, SIMKIM merupakan inovasi kelembagaan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat tata kelola keimigrasian yang responsif terhadap dinamika perlintasan orang asing. Sistem ini memungkinkan pemrosesan data visa dan izin tinggal dilakukan secara terstandardisasi, serta menyediakan akses real-time bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Penggunaan SIMKIM secara langsung mendukung prinsip e-governance dalam pelayanan keimigrasian melalui transparansi proses, peningkatan akurasi data, dan mitigasi risiko penyalahgunaan izin tinggal.

Lebih jauh, SIMKIM berfungsi sebagai alat bantu strategis dalam pengawasan keimigrasian berbasis teknologi, memungkinkan analisis data perlintasan, histori keimigrasian, dan pola penyalahgunaan izin tinggal secara sistemik. Namun demikian, efektivitas sistem ini masih dihadapkan pada tantangan implementatif, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tertinggal, disparitas kapasitas sumber daya manusia, serta kebutuhan harmonisasi dengan sistem digital instansi lain, seperti e-Visa dan database pengawasan orang asing lintas sektor. Oleh karena itu, strategi optimalisasi SIMKIM menuntut pendekatan kolaboratif antara inovasi teknologi, reformasi birokrasi, dan penguatan kelembagaan agar sistem informasi keimigrasian benar-benar mampu menjawab kompleksitas pengelolaan visa dan izin tinggal dalam era globalisasi.

Secara fungsional, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) bertindak sebagai alat utama dalam pengelolaan layanan keimigrasian, mulai dari penerbitan visa, pengurusan izin tinggal, hingga pencatatan aktivitas perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sistem ini memungkinkan pemrosesan dokumen keimigrasian dilakukan secara terpusat dan berbasis data elektronik yang terstandardisasi. Fungsi integratif SIMKIM memperkuat koordinasi antar-unit pelaksana teknis dan mendorong validasi informasi lintas wilayah secara real-time. Dengan demikian, SIMKIM tidak hanya memfasilitasi kelancaran administrasi, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian melalui sistem informasi yang akurat dan terdokumentasi.

Integrasi antara layanan e-Visa dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) mencerminkan upaya konsolidasi sistem digital dalam mendukung tata kelola keimigrasian yang lebih adaptif dan efisien. Kebijakan visa Indonesia beradaptasi dengan teknologi untuk meningkatkan layanan dan integrasi global. Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperbarui sistem guna mendukung transformasi digital keimigrasian (Estheria dkk, 2022). Melalui mekanisme e-Visa, pemohon dapat mengakses layanan permohonan visa secara daring tanpa harus hadir secara fisik, sedangkan data yang diperoleh dari proses ini secara otomatis diintegrasikan ke dalam SIMKIM sebagai basis data utama. Hal ini memungkinkan validasi, pencatatan, dan pengawasan izin tinggal dilakukan secara terstandardisasi dan berkesinambungan dari pusat hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dengan demikian, sinergi antara e-Visa dan SIMKIM tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi, akurasi data, dan efektivitas pengawasan keimigrasian dalam kerangka digitalisasi birokrasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan visa dan izin tinggal menjadi aspek krusial untuk memperkuat integrasi data serta sinergi antarinstansi keimigrasian. Melalui sistem terintegrasi seperti e-Visa dan SIMKIM, proses administrasi dapat dijalankan secara lebih efisien, terstruktur, dan terdigitalisasi. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan keimigrasian yang adaptif terhadap dinamika global serta perkembangan teknologi mutakhir. Selain itu, digitalisasi sistem mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data keimigrasian. Dengan demikian, optimalisasi teknologi informasi menjadi upaya strategis dalam modernisasi layanan keimigrasian di Indonesia yang semakin kompleks dan berkembang.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hasil-hasil penelitian terdahulu serta literatur terkait mengenai optimalisasi teknologi informasi dalam layanan visa dan izin tinggal di lingkungan keimigrasian. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan mengkaji berbagai sumber sekunder yang relevan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Teknologi Imigrasi

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dirancang sebagai tulang punggung digital dalam pengelolaan layanan keimigrasian yang komprehensif. Arsitektur sistem ini mengusung prinsip modular dan terdistribusi, memungkinkan interoperabilitas antara berbagai aplikasi, termasuk integrasi langsung dengan sistem e-Visa dan sistem pengawasan orang asing milik Direktorat Jenderal Imigrasi. Secara teknis, SIMKIM mengadopsi pendekatan sistem terbuka (open architecture) sehingga memudahkan koneksi data lintas unit teknis maupun instansi eksternal seperti Kementerian Luar Negeri dan aparat penegak hukum (Akasy, 2021). Kemampuan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung tata kelola imigrasi berbasis data dan memitigasi risiko fragmentasi informasi antar lembaga.

Lebih jauh, integrasi SIMKIM dengan e-Visa menandai pergeseran paradigma ke arah pelayanan publik yang sepenuhnya digital. Pemrosesan dokumen visa yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini telah terotomatisasi, dengan seluruh data pemohon langsung tersinkronisasi ke dalam sistem SIMKIM. Hal ini mempercepat proses validasi dan pencatatan izin tinggal, sekaligus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam prosedur pelayanan (Estheria et al., 2022). Interoperabilitas ini juga menjadi wujud konkret dari strategi e-Government yang menekankan efisiensi layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Kinerja Teknologi: Efisiensi, Keandalan, dan Aksesibilitas

Efisiensi operasional menjadi keunggulan utama dari penerapan teknologi keimigrasian ini. SIMKIM memungkinkan proses verifikasi dokumen, pembuatan data perjalanan, serta perekaman biometrik dilakukan dalam satu sistem terintegrasi, yang secara signifikan memangkas waktu pelayanan di Kantor Imigrasi (Sari, 2023). Dalam konteks Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, sistem ini telah memperlihatkan

performa yang cukup andal, terutama dalam hal pelacakan histori keimigrasian dan monitoring status izin tinggal orang asing secara real-time.

Selain efisiensi, aspek keandalan sistem turut menjadi sorotan. Berdasarkan studi oleh Wijaya (2021), SIMKIM menunjukkan tingkat uptime yang relatif tinggi dan kestabilan dalam pemrosesan data secara simultan, meskipun dalam kondisi lalu lintas perlintasan tinggi. Sementara dari sisi aksesibilitas, baik petugas imigrasi maupun pengguna eksternal seperti pemohon visa dapat mengakses sistem dengan relatif mudah melalui antarmuka daring. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal literasi digital di kalangan pemohon serta keterbatasan bandwidth di beberapa daerah operasional yang belum sepenuhnya mendukung konektivitas optimal.

Tantangan Manajerial: Sumber Daya, Keamanan Data, Infrastruktur, dan Regulasi

Meskipun penerapan teknologi informasi dalam sistem keimigrasian telah menunjukkan dampak positif yang nyata, terdapat berbagai kendala struktural yang masih menjadi tantangan signifikan. Salah satu isu utama adalah ketimpangan kompetensi sumber daya manusia. Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) masih menghadapi kesenjangan dalam penguasaan keterampilan digital oleh aparatur imigrasi, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi sistem dan memperlambat respons terhadap gangguan teknis (Halim, 2023). Di sisi lain, isu keamanan data juga menjadi krusial mengingat Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) mengelola data strategis terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya mitigasi seperti penerapan firewall berlapis, otentikasi ganda, serta enkripsi database, potensi kebocoran data masih tetap menjadi ancaman yang harus terus diwaspadai melalui evaluasi dan pembaruan sistem keamanan siber secara berkala (Santoso & Rahardjo, 2021).

Di samping itu, kualitas infrastruktur teknologi di wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan masih menghadapi keterbatasan yang signifikan. Keterbatasan ini mengakibatkan pelayanan keimigrasian yang tidak merata secara geografis dan memperkuat kesenjangan akses antara pusat dan daerah. Ketidakseimbangan ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang bersifat afirmatif guna memastikan inklusivitas dalam penerapan layanan digital keimigrasian. Selain faktor teknis, aspek normatif juga memerlukan pembaruan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam merespons kebutuhan akan regulasi yang menjamin perlindungan data pribadi serta kepastian hukum bagi pemohon layanan digital. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital di bidang keimigrasian tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga pada kesiapan regulatif dan kualitas sumber daya manusia.

Studi Komparatif: Pembelajaran dari Negara Lain

Pembelajaran dari negara lain memberikan kontribusi penting dalam memperluas cakrawala pemikiran mengenai pengembangan sistem keimigrasian digital di Indonesia. Singapura, sebagai contoh, telah mengadopsi sistem ICA e-Services yang menyatukan seluruh proses permohonan visa, izin tinggal, serta pencatatan perlintasan keimigrasian dalam satu platform terintegrasi yang diperkuat oleh autentikasi biometrik canggih. Di sisi lain, Australia memanfaatkan sistem ImmiAccount berbasis komputasi awan yang terhubung secara langsung dengan database penegakan hukum dan sistem intelijen, memungkinkan proses deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian (OECD, 2021). Jika dibandingkan dengan kedua negara tersebut, Indonesia saat ini masih berada dalam fase transisi menuju sistem yang sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi antarlembaga. Meski demikian, capaian Indonesia dalam menginisiasi transformasi digital, seperti melalui layanan e-Visa, menunjukkan arah yang progresif. Kendala utama

yang dihadapi tidak semata-mata terletak pada aspek teknologi, melainkan juga pada kebutuhan akan sinergi lintas sektor yang konsisten serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Implikasi terhadap Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional

Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan layanan e-Visa memberikan kontribusi strategis terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus penguatan sistem keamanan nasional. Dari perspektif pelayanan, digitalisasi proses keimigrasian telah mempercepat alur birokrasi, meminimalkan potensi terjadinya maladministrasi, serta meningkatkan kredibilitas institusi imigrasi di mata masyarakat dan pemangku kepentingan internasional. Sementara itu, dari aspek keamanan, keberadaan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis waktu nyata (real-time) menjadi instrumen kunci dalam deteksi awal terhadap pola perlintasan mencurigakan maupun indikasi penyalahgunaan izin tinggal. Dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, sistem keimigrasian berbasis teknologi tidak lagi dapat dipandang sebagai perangkat administratif semata, melainkan telah bertransformasi menjadi perangkat strategis yang berperan dalam menjaga kedaulatan wilayah, memperkuat kontrol perbatasan, serta mendukung agenda pembangunan nasional melalui tata kelola mobilitas orang asing yang transparan, efisien, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan yang terfokus dan telah memenuhi sasaran penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) berperan sebagai infrastruktur digital utama yang memungkinkan pengelolaan data visa dan izin tinggal secara terpusat dan real-time, sehingga mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola keimigrasian. Integrasi SIMKIM dengan layanan e-Visa menerapkan prinsip pemerintahan elektronik yang mempercepat proses administratif dengan mekanisme daring yang efisien dan terdokumentasi dengan baik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keakuratan data dan memperluas jangkauan layanan tanpa batasan spasial, tetapi juga menguatkan fungsi pengawasan guna mencegah potensi penyalahgunaan izin tinggal. Dengan demikian, penerapan teknologi ini menjadi katalisator penting dalam mewujudkan tata kelola keimigrasian yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik modern.
2. Meskipun integrasi SIMKIM dan e-Visa memberikan dampak positif signifikan, implementasinya menghadapi sejumlah kendala yang meliputi ketimpangan infrastruktur teknologi antar wilayah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam pertukaran data. Hambatan-hambatan tersebut berpotensi menghambat pemerataan kualitas layanan keimigrasian secara nasional dan menurunkan efektivitas pengelolaan data. Oleh karena itu, upaya optimalisasi sistem harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan, program pelatihan berkelanjutan bagi SDM, serta modernisasi infrastruktur digital yang merata di seluruh Unit Pelaksana Teknis. Selain itu, penerapan kerangka teori seperti Technology Acceptance Model (TAM) dan ITIL memberikan landasan bagi peningkatan adopsi teknologi melalui pemahaman persepsi pengguna, sehingga inovasi dalam layanan keimigrasian perlu terus dikembangkan guna menjawab dinamika globalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan saran untuk mendukung penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Saran Akademis

- Pengembangan Kompetensi SDM dalam Teknologi Keimigrasian

Penting untuk melakukan penelitian lanjutan yang fokus pada peningkatan kapasitas dan keterampilan digital aparatur imigrasi. Studi empiris yang mendalam diperlukan guna merumuskan model pelatihan efektif yang dapat mengatasi disparitas kompetensi di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga mendukung optimalisasi pemanfaatan SIMKIM dan e-Visa secara menyeluruh.

- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Keamanan Data Digital Keimigrasian

Diperlukan kajian akademik yang intensif mengenai strategi mitigasi risiko keamanan siber dalam sistem informasi keimigrasian. Penelitian ini harus mengkaji mekanisme proteksi data mutakhir serta pendekatan manajemen risiko yang adaptif untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data keimigrasian dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

- Analisis Integrasi Sistem dan Harmonisasi Kebijakan Digital di Sektor Keimigrasian

Perlu dilakukan riset interdisipliner yang menelaah aspek teknis dan kebijakan dalam integrasi antara SIMKIM, e-Visa, dan sistem digital lintas instansi. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung interoperabilitas sistem, sekaligus mengoptimalkan sinergi antar lembaga guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keimigrasian.

2. Saran Praktis

- Peningkatan Pelatihan dan Pembinaan SDM secara Berkelanjutan

Kantor Imigrasi perlu mengimplementasikan program pelatihan teknologi informasi yang rutin dan terstruktur bagi seluruh pegawai di berbagai UPT. Hal ini untuk memastikan seluruh petugas memiliki kemampuan digital yang memadai dalam mengoperasikan SIMKIM dan layanan e-Visa, sekaligus meningkatkan adaptasi terhadap pembaruan sistem teknologi.

- Penguatan Infrastruktur Teknologi di Wilayah Operasional

Optimalisasi layanan digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan di wilayah tertinggal, perbatasan, dan daerah terpencil. Upaya ini mencakup penyediaan bandwidth yang memadai, perangkat keras yang andal, serta dukungan teknis yang siap sedia untuk mengatasi gangguan sistem agar layanan keimigrasian berjalan lancar tanpa hambatan teknis.

- Implementasi Protokol Keamanan Siber yang Komprehensif

Pengelola sistem perlu memperkuat penerapan mekanisme keamanan data melalui update berkala pada firewall, otentikasi multi-faktor, serta enkripsi data yang ketat. Selain itu, disarankan untuk membangun sistem monitoring dan audit keamanan secara kontinu agar potensi risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi dapat diminimalkan secara efektif..

DAFTAR PUSTAKA

- Akasy, R. (2021). Peran SIMKIM dalam integrasi data keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 145–159.
- Dewi, S. (2023). Manajemen inovasi digital di sektor publik: Studi kasus keimigrasian Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 12(1), 45–60.
- Estheria, A., Permata, L., & Wijanarko, T. (2022). Transformasi layanan keimigrasian melalui sistem e-Visa dan SIMKIM terintegrasi. *Jurnal Birokrasi dan Teknologi Informasi*, 10(1),

- Halim, M. (2021). Visa dan izin tinggal: Tinjauan hukum keimigrasian Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 34–48.
- Halim, M. (2023). Pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia dalam layanan keimigrasian. *Jurnal Manajemen Publik*, 14(1), 97–110.
- Halim, Y. (2023). Evaluasi kompetensi SDM dalam pengelolaan teknologi keimigrasian di wilayah perbatasan. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan*, 5(3), 201–215.
- OECD. (2021). Digital government review of Australia: Towards a data-driven public sector. *OECD Digital Government Studies*
- Ramadhan, T. (2022). Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam layanan keimigrasian digital. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 11(2), 78–90.
- Santoso, B., & Rahardjo, S. (2021). Digitalisasi layanan keimigrasian dan implementasi e-Government. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(4), 155–169.
- Santoso, I., & Rahardjo, B. (2021). Strategi keamanan siber dalam pengelolaan data keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 88–103.
- Sari, M. D. (2023). Analisis efektivitas Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam pelayanan publik di Kantor Imigrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 12(2), 120–134.
- Sutanto, E. (2021). ITIL dan manajemen layanan TI di sektor pemerintahan. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 9(3), 134–149.
- Wijaya, F. (2021). Studi evaluatif sistem SIMKIM dalam meningkatkan kinerja imigrasi di era digital. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 9(4), 300–314.
- Wijaya, I. (2021). Optimalisasi manajemen teknologi informasi untuk pelayanan keimigrasian. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 67–82.
- Wijayanti, D. (2020). Tantangan digitalisasi layanan keimigrasian di wilayah terpencil. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*, 7(3), 59–72.